

Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur SPLP Ver. 032024

Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja	Dokumen Pendukung			Acuan		
Tahapan 1	Perencanaan				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Aktivitas 1	Penyelenggaraan	Level 1	Level 2	Level 3	(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
Indikator 1	Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPL dan / atau SPLP?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti penggunaan SPL / SPLP	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 2	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 2	Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sendiri memiliki Katalog Layanan Interoperabilitas Data?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti katalog LID / katalog LID Nasional	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 10	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 3	Bagaimanakah SPL Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sendiri sudah terhubung dengan SPLP?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti keterhubungan dengan SPLP	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 4	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 4	Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sudah mendaftarkan Layanan Interoperabilitas Data ke Katalog Nasional?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti katalog LID Nasional	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 11	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 5	Bagaimana prosedur pendaftaran Penyedia LID dan Pengguna LID pada Sistem Penghubung Layanan (SPL)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti adanya alur pendaftaran penyedia dan pengguna LID pada SPL	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 6	Bagaimana Penyelenggaraan LID menerapkan LID sesuai dengan Prinsip (andal dan aman, dapat digunakan kembali, dapat dibaca, dst)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti penerapan prinsip pada SPL	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 5	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 7	Jelaskan terkait kajian kebutuhan penerapan Layanan Interoperabilitas Data?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti adanya kajian kebutuhan untuk LID	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin A	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Aktivitas 2	Persyaratan Organisasi						

Indikator 8	Jelaskan satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penerapan LID?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Organisasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas persyaratan organisasi	Penerapan aktivitas persyaratan organisasi dengan bukti adanya satuan kerja penyelenggara dan penyedia LID	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin B	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 9	Jelaskan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Interoperabilitas Data?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Organisasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas persyaratan organisasi	Penerapan aktivitas persyaratan organisasi dengan bukti : - Surat penugasan; dan - Sertifikat pelatihan, seminar, atau lokakarya yang pernah diikuti	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin B	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Tahapan 2	Pengembangan						
Aktivitas 1	Implementasi						
Indikator 10	Jelaskan rancangan pengembangan Sistem Penghubung Layanan (development design)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Implementasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas implementasi	Penerapan aktivitas implementasi dengan bukti adanya rancangan pengembangan (development design)	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin A	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 11	Bagaimana hasil perubahan pengembangan Sistem Penghubung Layanan sebelum dan sesudah pengembangan?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Implementasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas implementasi	Penerapan aktivitas implementasi dengan bukti : - Dokumentasi SPLP sebelum pengembangan - Dokumentasi SPLP setelah pengembangan	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 12 poin 4 sub poin f	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 12	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada SPL dan/ SPLP yang sedang diaudit?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Implementasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas implementasi	Penerapan aktivitas implementasi dengan bukti Atribut metadata Sistem Penghubung Layanan	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18) - Arsitektur Infrastruktur SPLP (indikator 11)	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 132 Tahun 2022 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Aktivitas 2	Instalasi						
Indikator 13	Bagaimana prosedur instalasi Sistem Penghubung Layanan (SPL)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Instalasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas instalasi	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti prosedur instalasi SPL	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Pasal 19	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 14	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi di mana SPL terpasang?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Instalasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas instalasi	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti Atribut metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18) - Arsitektur Infrastruktur SPLP (indikator 11)	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 132 Tahun 2022 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2

Indikator 15	Isikan atribut Metadata Perangkat Lunak Platform yang SPL gunakan?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Instalasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas instalasi	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti Atribut metadata Perangkat Lunak Platform	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18) - Arsitektur Infrastruktur SPLP (indikator 11)	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 132 Tahun 2022 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 16	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah di mana SPL terhubung?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Instalasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas instalasi	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18) - Arsitektur Infrastruktur SPLP (indikator 11)	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 132 Tahun 2022 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Aktivitas 3 Pengujian							
Indikator 17	Bagaimana pengujian teknis (uji beban, uji kesesuaian dengan arsitektur penyelenggaraan dan uji kesesuaian dengan standar interoperabilitas data)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pengujian	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pengujian	Penerapan aktivitas pengujian dengan bukti hasil pengujian teknis SPL	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 18	Bagaimana melakukan pengujian teknis dengan simulasi gangguan terhadap SPL?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pengujian	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pengujian	Penerapan aktivitas pengujian dengan bukti hasil pengujian teknis simulasi saat terjadi gangguan SPL	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 19	Bagaimana hasil uji kualitas (antara rencana pengujian dan hasil pengujian) dilakukan terhadap SPL?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pengujian	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pengujian	Penerapan aktivitas pengujian dengan bukti hasil uji kualitas SPL	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Tahapan 3 Pengoperasian							
Aktivitas 1 Mekanisme Kerja							
Indikator 20	Jelaskan panduan teknis (technical guide) yang berisi prosedur kerja?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Mekanisme Kerja	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas mekanisme kerja	Penerapan aktivitas mekanisme kerja dengan bukti adanya panduan teknis	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin A	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 21	Jelaskan panduan penggunaan (user guide) yang berisi panduan penggunaan?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Mekanisme Kerja	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas mekanisme kerja	Penerapan aktivitas mekanisme kerja dengan bukti adanya panduan penggunaan	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2

Indikator 22	Jelaskan formulir dan rekam jejak (log record) yang mencatat pelaksanaan prosedur maupun panduan kerja?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Mekanisme Kerja	Kebijakan Internal Layanan SPL mengatur aktivitas mekanisme kerja	Penerapan aktivitas mekanisme kerja dengan bukti : - Formulir pencatatan - rekam jejak (log record) atau log transaksi	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Aktivitas 2	Persyaratan Teknis						
Indikator 23	Jelaskan komponen yang digunakan berbasis teknologi interoperabilitas terbuka?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPL mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti teknologi SPL dikembangkan oleh teknologi interoperabilitas terbuka	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 24	Jelaskan kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPL mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti : - Dokumen rencana pemulihan bencana (DRP); dan - Rencana keberlangsungan bisnis (BCP).	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 25	Jelaskan infrastruktur yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPL mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumen register aset infrastruktur (minimal memuat spesifikasi dan penanggung jawab aset)	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 26	Jelaskan dalam bentuk dokumentasi dan Arsitektur Penyelenggaraan LID yang paling sedikit berisi kode sumber, Metadata, kamus Data, format Data, kode Akses, alamat Akses, dan dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPL mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumentasi	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 27	Jelaskan data yang dibagipakaikan sudah mengikuti rekomendasi standar Data yang sudah ditetapkan oleh Pembina Data?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPL mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumentasi	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 1	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 28	Jelaskan Metadata, kode referensi, dan Data induk yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPL mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumentasi	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Tahapan 4	Pemeliharaan						
Aktivitas 1	Pemantauan dan Evaluasi						

Indikator 29	Bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan prinsip?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pemantauan dan Evaluasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pemantauan dan evaluasi	Penerapan aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan bukti hasil pemantauan dan evaluasi	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 30	Bagaimana rekomendasi hasil dari pemantauan dan evaluasi ?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pemantauan dan Evaluasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pemantauan dan evaluasi	Penerapan aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan bukti hasil rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 31	Jelaskan terkait pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pemantauan dan Evaluasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pemantauan dan evaluasi	Penerapan aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan bukti : - Hasil pemantauan dan evaluasi berkala - Rekomendasi pemantauan dan evaluasi berkala	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Domain 4	Aspek Lain						
Tahapan 1	Kepatuhan						
Aktivitas 1	Hukum						
Indikator 32	Jelaskan SPL yang digunakan sudah berada di Pusat Data Nasional?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Hukum	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas hukum	Penerapan aktivitas hukum dengan bukti keterhubungan SPL disimpan di Pusat Data Nasional / penggunaan SPLP	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Perpres SPBE - Pasal 30	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Tahapan 2	Sertifikasi						
Aktivitas 1	Kelaikan						
Indikator 33	Apakah sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika?	Undangan rapat atau notulensi Aktivitas Kelaikan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas kelaikan	Penerapan aktivitas kelaikan dengan bukti tersedia pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas data	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	- Perpres SPBE - Pasal 33 - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 7	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 34	Apakah sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?	Undangan rapat atau notulensi Aktivitas Kelaikan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas kelaikan	Penerapan aktivitas kelaikan dengan bukti tersedia pertimbangan kelaikan keamanan	- Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) - Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 18)	Perpres SPBE - Pasal 33	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2

Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah

Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja Jaringan Intra Pemerintah	Dokumen Pendukung		
Tahapan 1	Perencanaan			
Aktivitas 1	Kebutuhan Bisnis (Business Requirement)	Level 1	Level 2	Level 3
Indikator 1	Bagaimana menentukan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Pedoman JIP Instansi
Indikator 2	Bagaimana JIP menghubungkan jaringan ke semua unit dan/atau satuan kerja di bawah Instansi?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Pedoman dan dokumentasi keterhubungan JIP antar semua unit dan/atau satuan kerja di bawah instansi
Indikator 3	Bagaimana JIP menyediakan keterhubungan jaringan dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Jaringan Nasional Intra Pemerintah?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Pedoman dan dokumentasi keterhubungan JIP antar instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain; 2. Pedoman dan dokumentasi keterhubungan JIP dengan Jaringan Nasional;
Indikator 4	Bagaimana alokasi sumber daya (manusia dan fasilitas pendukung lain) yang disediakan untuk penyelenggaraan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Surat Tugas/Daftar SDM yang bertugas dalam pengembangan JIP; 2. Daftar kebutuhan dalam pengembangan JIP.
Indikator 5	Bagaimana rencana pelatihan personil yang akan mengembangkan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Sertifikat pelatihan penembangan kompetensi SDM JIP
Aktivitas 2	Kebutuhan Jaringan (Network Requirement)			
Indikator 6	Apa saja proses/layanan yang terhubung oleh JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Daftar layanan yang terhubung oleh JIP
Aktivitas 3	Rancangan Jaringan (Network Design)			
Indikator 7	Bagaimana persiapan yang dilakukan dalam melakukan perancangan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Prosedur pengembangan JIP; 2. Laporan rancangan jaringan

Indikator 8	Bagaimana melakukan analisis dampak lingkungan dalam melakukan perancangan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Hasil analisis dampak lingkungan
Indikator 9	Seberapa besar cakupan dari JIP yang akan dirancang?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Topologi Jaringan
Tahapan 2	Pengembangan			
Aktivitas 1	Implementasi Jaringan (Network implementation)			
Indikator 10	Apa sajakah metode-metode yang digunakan dalam pengembangan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Metode pengembangan JIP
Indikator 11	Bagaimana susunan konfigurasi JIP yang dikembangkan?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Konfigurasi JIP
Indikator 12	Lampirkan Manual dan Dokumentasi terkait pengembangan JIP.	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1) Manual pengembangan jaringan; 2) Dokumentasi pengembangan jaringan
Indikator 13	Isikan atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah pada JIP yang sedang diaudit	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah
Aktivitas 2	Instalasi (Installation)			
Indikator 14	Bagaimana prosedur instalasi JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Prosedur instalasi JIP; 2. Daftar personil dan kebutuhan dalam proses instalasi; 3. Log/Laporan Instalasi;
Indikator 15	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Jaringan
Indikator 16	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Keamanan
Indikator 17	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Periferal yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Periferal
Indikator 18	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan di mana JIP yang sedang diaudit terkoneksi?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Komputasi Awan
Indikator 19	Isikan atribut Metadata Fasilitas Komputasi di mana JIP yang sedang diaudit terkoneksi?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Fasilitas Komputasi
Aktivitas 3	Pengujian (Testing)			

Indikator 20	Bagaimana proses pengujian dalam rangka pengembangan JIP dilakukan?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1) Rencana dan Rancangan Pengujian; 2) Prosedur pengujian; 3) Laporan Pengujian
Tahapan 3	Pengoperasian			
Aktivitas 1	Utilisasi/Kinerja Jaringan (Network utilization/performance)			
Indikator 21	Bagaimana prosedur pengoperasian jaringan intra pemerintah antar badan pemerintahan atau dalam badan pemerintahan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur pengeoperasian JIP
Indikator 22	Bagaimana bentuk layanan teknis dalam operasional jaringan untuk pengguna jaringan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	- Sistem helpdesk JIP - Rekaman layanan teknis
Indikator 23	Bagaimana instansi menyelenggarakan sistem komunikasi intra badan pemerintahan berbasis VoIP?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen penomoran ekstensi setiap perangkat komunikasi berbasis VOIP
Indikator 24	Bagaimana instansi menyusun dan melaksanakan tata kelola pengoperasian jaringan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	- topologi - pengalamatan IP - manajemen aset - manajemen pengguna
Indikator 25	Bagaimana instansi menetapkan perangkat pendukung pengamanan untuk jaringan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen perangkat pengamanan jaringan
Tahapan 4	Pemeliharaan			
Aktivitas 1	Pemeliharaan Jaringan (Network Maintenance)			
Indikator 26	Bagaimanakah melakukan pengendalian (mengawasi, memantau, dan memelihara) jaringan secara terpusat?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	- Prosedur pengendalian jaringan - Dokumentasi Pusat Pengendalian Jaringan (NOC)
Indikator 27	Bagaimana hasil dari pengendalian jaringan terkait keamanan, kehandalan dan ketersediaan jaringan?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumentasi pengendalian jaringan terkait keamanan, kehandalan dan ketersediaan jaringan
Aktivitas 2	Manajemen Konfigurasi Jaringan/MKJ (Network Configuration Management)			

Indikator 28	Bagaimana prosedur pemeliharaan dalam konfigurasi jaringan?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur pemeliharaan konfigurasi jaringan
Domain 4	Aspek Lain Jaringan Intra Pemerintah			
Tahapan 1	Kepatuhan			
Aktivitas 1	Kepatuhan berkaitan dengan pusat data			
Indikator 29	Bagaimana prosedur akses secara jaringan intra pemerintah ke pusat data?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur akses JIP ke pusat data
Indikator 30	Bagaimana rencana keberlangsungan kegiatan (Business Continuity Plan) kondisi mendapatkan gangguan atau bencana?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen rencana keberlangsungan kegiatan (BCP)
Tahapan 2	Sertifikasi			
Aktivitas 1	Kelaikan			
Indikator 31	Apakah jaringan sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika?	- Undangan rapat atau notulensi	- Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE - Hasil uji kelaikan internal	Tersedia pertimbangan kelaikan operasi
Indikator 32	Apakah jaringan sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?	- Undangan rapat atau notulensi	- Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE - Hasil uji kelaikan internal	Tersedia pertimbangan kelaikan keamanan

Infrastruktur: Pusat Data

Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja Pusat Data	Dokumen Pendukung		
Tahapan 1	Perencanaan			
Aspek 1	Analisis Kebutuhan	Level 1	Level 2	Level 3
Indikator 1	Penyedia layanan pusat data memiliki kebijakan, sistem dan prosedur untuk melakukan analisis kebutuhan layanan pusat data, baik pada saat pusat data akan dibangun maupun pada saat akan mulai menyediakan layanan kepada pihak intern maupun ekstern.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 2	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap ruang lingkup layanan pusat data dari sisi cakupan geografis jenis industri yang dilayani	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 3	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap kategori layanan pusat data dan hal lain	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 4	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap jenis layanan yang dibutuhkan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 5	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap tingkat layanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 6	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap ukuran kinerja yang diacu	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 7	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap pelaporan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 8	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang terkait dengan layanan pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE

Aspek 2	Manajemen Risiko dan Kesesuaian			
Indikator 9	Bagaimana penerapan manajemen risiko dan manajemen kesesuaian yang dimiliki penyelenggara Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Manajemen Risiko dan Kesesuaian)	Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 10	Jelaskan perencanaan tindakan untuk menangani risiko dan peluang beserta prioritasnya	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Manajemen Risiko dan Kesesuaian)	Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Aspek 3	Gedung Pusat Data			
Indikator 11	Jelaskan lokasi Gedung Pusat Data yang tidak berada pada area rentan bencana sesuai dengan peta BTMG	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 12	Jelaskan Lokasi Gedung Pusat Data tidak berada pada lokasi rawan huruhara, seperti perkampungan padat atau kumuh	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 13	Jelaskan jarak antara Lokasi Gedung Pusat Data dengan arteri lalu lintas, jalan raya utama dan jalur kereta api utama lebih dari 91 m	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 14	Jelaskan jarak antara Lokasi Gedung Pusat Data ke bandara utama dan/atau pelabuhan lebih dari 1,6 km	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 15	Jelaskan area parkir antara karyawan dengan pengunjung yang dipisahkan secara fisik dengan pagar pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 16	Jelaskan area parkir dan area bongkar muat yang dipisahkan secara fisik dan masing-masing memiliki akses keluar masuk yang berbeda pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 17	Jelaskan area parkir pengunjung Gedung Pusat Data dengan tembok perimeter pusat data dipisahkan dengan penghalang fisik untuk mencegah kendaraan melaju lebih dekat	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 18	Jelaskan cetak biru gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 19	Bagaimana ketahanan Bangunan Pusat Data terhadap gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 sekurang-kurangnya kategori resiko II	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 20	Jelaskan bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang-kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 21	Jelaskan pembagian ruangan untuk Area Perkantoran, Area Telekomunikasi, dan Area Server pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 22	Jelaskan material gedung Pusat Data memiliki ketahanan api minimal 1 jam dari dinding bantalan eksterior, dinding bantalan interior, dinding eksterior tanpa bantalan, bingkai struktural, interior dinding partisi ruangan non komputer, dinding partisi area server interior, lantai dan langit-langit, atap dan plafon,	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 23	Jelaskan ketahanan pengembunan Material gedung Pusat Data sesuai yang dipersyaratkan oleh SNI 1741:2008	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 24	Bagaimana fitur pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan operasional gedung, dan pelayanan penghuni atau tamu pada sistem monitoring gedung pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 4	Sistem Kelistrikan			
Indikator 25	Jelaskan titik masuk listrik pertama pada Pusat Data memiliki 2 jalur primer: 1 aktif dan 1 siaga	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 26	Jelaskan sistem kelistrikan Pusat Data menggunakan Trafo kering 20kV/400V	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 27	Jelaskan perpindahan dari listrik utama ke listrik cadangan secara otomatis, minimum menggunakan ATS sesuai IEC 60947-6-1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 28	Jelaskan layanan catu daya utama khusus untuk Pusat Data dan tidak bersama gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 29	Jelaskan layanan catu daya cadangan khusus untuk Pusat Data dan tidak bersama gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 30	Jelaskan tempat penyimpanan bahan bakar berjumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 31	Jelaskan pompa tangki penyimpanan dan pemipaan bahan bakar berjumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 32	Apakah kapasitas bahan bakar yang tersedia di lokasi minimal 24 jam	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 33	Jelaskan UPS yang dimiliki redundan dengan jumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 34	Jelaskan topologi paralel redundan dan VFI (Voltage and Frequency Independent) pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 35	Jelaskan sambungan langsung otomatis dengan jalur sendiri pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 36	Bagaimana pengaturan perawatan sambungan langsung dengan jalur sendiri yang menghubungkan ke output panel UPS pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 37	Apakah setiap UPS memiliki rangkaian seri baterai sendiri	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 38	Apakah waktu cadangan minimal baterai dengan beban di akhir masa pakai baterai minimal 10 menit	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 39	Apakah jenis baterai pada UPS adalah Sealed Lead Acid (SLA)	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 40	Jelaskan studi hubungan singkat, studi koordinasi, dan studi aliran beban pada Sistem kelistrikan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 41	Apakah konstruksi panel listrik memenuhi persyaratan dalam IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5, dan IEC 61439-6	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 42	Bagaimana pemisahan jalur kabel bermuatan listrik untuk menghindari radiasi dan interferensi elektromagnetik pada Pusat data?	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 43	Apakah setiap kabel memiliki label jalur dan tercatat dalam dokumentasi dan diagram?	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 44	Jelaskan pembumian bagi perangkat teknologi informasi, panel elektrikal, perangkat dari bahan metal dan pembumian penangkal petir sesuai ketentuan SNI 0225:2011 pada Pusat data.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 45	Jelaskan sistem perlindungan terhadap bahaya petir dan pembumian dengan ketahanan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ohm pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 46	Jelaskan perhitungan efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (Power Usage Effectiveness) terhadap keseluruhan beban daya maksimum pada Sistem kelistrikan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 5	Spesifikasi Sistem Pendinginan			
Indikator 47	Apakah temperatur ruangan dijaga pada suhu 18°C - 27°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 48	Apakah tingkat Perubahan temperatur ruangan dijaga per jam maksimum 5°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 49	Apakah kelembaban ruangan : RH (Relative Humidity) $\leq 60\%$, titik embun 5,5°C - 15°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 50	Apakah tingkat Perubahan kelembaban ruangan dijaga maksimum per jam : 5% RH	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 51	Bagaimana posisi rak server disusun sebagai pemisah jalur panas dan dingin.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 52	Apakah bagian pada rak server yang kosong ditutup untuk menjaga pendinginan maksimal	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 6	Spesifikasi Sistem Jaringan Data			
Indikator 53	Apakah Pusat Data memiliki label kabel yang terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 54	Jelaskan jalur terpisah bagi penyedia layanan data komunikasi yang disediakan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 55	Jelaskan akses redundan untuk sistem jaringan data area perkantoran pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 56	Jelaskan titik masuk jaringan data redundan pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 57	Jelaskan redundan kabel utama dan jalurnya pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 58	Jelaskan redundan sumber listrik untuk router dan switch dengan redundan koneksi internet pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 7	Spesifikasi Sistem Pemadam Kebakaran			
Indikator 59	Bagaimana sistem deteksi kebakaran pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 60	Bagaimana sistem sprinkler api untuk ruangan selain area server dan telekomunikasi Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 61	Apakah Pusat Data memiliki sistem pemadam berbahan gas.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 62	Bagaimana sistem deteksi asap peringatan dini pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 63	Bagaimana Pusat Data mengintegrasikan sistem deteksi kebakaran dengan sistem infrastruktur lainnya.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 8	Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data			

Indikator 64	Apakah Pusat Data memiliki sistem monitoring baterai untuk sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 65	Jelaskan titik pantau di Utilitas, trafo utama, UPS, genset, sirkuit pemutus arus, panel distribusi, ATS pada sistem monitoring lingkungan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 66	Jelaskan metoda pemberitahuan melalui Konsol ruang kontrol, email dan/atau pesan teks pada sistem monitoring lingkungan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 67	Apakah sistem monitoring lingkungan Pusat Data mampu mendeteksi kebocoran air	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 9	Persyaratan Keamanan Fisik			
Indikator 68	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang genset	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 69	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang UPS, telepon, dan ruang mekanikal elektrik	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 70	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang kendali (Network Operation Center (NOC))	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 71	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang pusat keamanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 72	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang operasi jaringan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 73	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang peralatan keamanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 74	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk pintu menuju area ruang server	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 75	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk perimeter pintu gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 76	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk pintu utama menuju area server	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 77	Apakah penyelenggara Pusat Data membangun pintu masuk dengan pos pemeriksaan keamanan di area server, area bongkar muat, dan ruang penyimpanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 78	Bagaimana pencatatan tamu atau pengunjung secara manual dan elektronik/digital	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 79	Bagaimana penerapan sistem interlock satu orang, portal untuk mencegah kembali atau lewat pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 80	Apakah Pusat Data memiliki minimal 1 (satu) area bongkar muat	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 81	Bagaimana Pusat Data melakukan pemisahan secara fisik antara area pengiriman dan penerimaan dengan area lain di pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 82	Apakah Pusat Data memiliki jumlah pelaksana operasional sebanyak 2 orang per sif atau lebih dengan jam kerja 24/7/365	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 83	Apakah Pusat Data memiliki jumlah personil keamanan sebanyak minimal 2 orang per sif atau lebih dengan jam kerja 24/7/365	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan

Tahapan 2	Pengembangan			
Aspek 1	Implementasi			
Indikator 84	Bagaimana metode/standard pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait metode pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 85	Bagaimana dokumentasi pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait dokumentasi pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 86	Bagaimana dokumentasi perubahan pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait dokumentasi perubahan pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 87	Bagaimana rencana penerapan dan pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait rencana penerapan dan pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 88	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan untuk Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Komputasi Awan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Aspek 2	Instalasi			
Indikator 89	Bagaimana prosedur instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait prosedur instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 90	Bagaimana Daftar SDM dalam instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait SDM yang terlibat instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen SDM
Indikator 91	Bagaimana perencanaan pelatihan SDM dalam instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait perencanaan pelatihan SDM dalam instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen SDM

Indikator 92	Bagaimana penjadwalan instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait penjadwalan instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Jadwal Instalasi
Indikator 93	Bagaimana daftar fasilitas selama instalasi Pusat data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait daftar fasilitas selama instalasi Pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 94	Isikan atribut Metadata Fasilitas Komputasi yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Fasilitas Komputasi sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 95	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Server yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Server sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 96	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 97	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 98	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 99	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Periferal yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022

Indikator 100	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah di mana Pusat Data yang sedang diaudit terkoneksi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Aspek 3	Pengujian			
Indikator 101	Bagaimana rencana pengujian (Test Plan) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait rencana pengujian (Test Plan) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan pengujian (Test Plan)
Indikator 102	Bagaimana rancangan pengujian (Test Design) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait rancangan pengujian (Test Design) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan rancangan pengujian (Test Design)
Indikator 103	Bagaimana prosedur pengujian (Test Procedures) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait prosedur pengujian (Test Procedures) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan prosedur pengujian (Test Procedures)
Indikator 104	Bagaimana laporan pengujian (Test Report) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait laporan pengujian (Test Report) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Laporan pengujian (Test Report)
Tahapan 3	Pengoperasian			
Aspek 1	Organisasi Penyelenggara Pusat Data			
Indikator 105	Penyelenggara Pusat Data menyediakan bagan organisasi pusat data serta prosedur eskalasi intern dan ekstern	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 106	Penyelenggara Pusat Data memiliki nomor kontak yang beroperasi 24 jam, 7 hari dan terbagi dalam sif kerja	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 107	Penyelenggara Pusat Data memiliki sekurang-kurangnya karyawan bagian operasional pusat data, karyawan bagian jaringan, dan karyawan bagian infrastruktur pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 108	Penyelenggara Pusat Data memiliki karyawan dengan berbagai kompetensi pusat data, bersertifikat dan memiliki pengalaman.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 109	Penyelenggara Pusat Data memiliki kontrak kerja karyawan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 110	Penyelenggara Pusat Data memahami Perjanjian Tingkat Layanan bagi pengguna layanan Pusat Data	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 111	Penyelenggara Pusat Data menyediakan diagram infrastruktur terkait ruangan, kelistrikan, sistem pendinginan, dan jaringan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 112	Penyelenggara Pusat Data memiliki sistem manajemen yang meliputi kebijakan, prosedur kerja, monitoring, pengukuran kinerja, dan pelaporan pengelolaan pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 2	Sistem Manajemen Layanan Operasional Pusat Data			
Indikator 113	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen Ketersediaan Pusat Data dan Layanan Pusat Data yang menjaga ketersediaan 99,98%	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 114	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen fasilitas pusat data	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 115	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen aset sesuai dengan dengan SNI ISO 55001 dan ISO/IEC 19770-1	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 116	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen konfigurasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 3	Manajemen SDM Pusat Data			

Indikator 117	Penyelenggara pusat data memiliki dokumen matriks keterampilan yang menggambarkan kebutuhan keterampilan sesuai dengan layanan pusat data yang disediakan dan berbagai persyaratan operasional.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 118	Penyelenggara pusat data merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan untuk sekumpulan karyawan maupun untuk masing - masing karyawan sesuai dengan rencana peningkatan karir dan kompetensinya.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 119	Penyelenggara pusat data meninjau dan mengevaluasi secara berkala program pelatihan untuk dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 120	Penyelenggara pusat data menetapkan kebijakan dan mekanisme kerja untuk mengukur kinerja sumber daya manusia	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 4	Monitoring, Pelaporan, dan Pengendalian			
Indikator 121	Penyelenggara pusat data melakukan monitoring aktivitas pada gedung pusat data dan aktivitas lain yang sedang berlangsung baik secara manual atau dengan menggunakan aplikasi dan/atau keduanya secara bersamaan.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 122	Penyelenggara pusat data melaporkan kejadian tercatat dengan rincian waktu kejadian, waktu pelaporan dan resolusi akhir kejadian.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 123	Penyelenggara pusat data mengevaluasi, menganalisis kejadian, dan memitigasi kejadian	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 124	Penyelenggara pusat data mencatat perubahan kendali dalam dokumen pengendalian	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 5	Manajemen Keberlangsungan Kegiatan dan Lingkungan			

Indikator 125	Penyelenggara pusat data menyediakan dan menerapkan prosedur kelangsungan kegiatan /Business Continuity Plan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 126	Penyelenggara pusat data menyediakan organisasi manajemen kelangsungan kegiatan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 127	Penyelenggara pusat data menyediakan moda pencadangan pada Disaster Recovery Center yang diterapkan secara off-site, secondary site dan/atau mirroring	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 128	Penyelenggara melakukan tes Disaster Recovery Plan berkala yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya setahun sekali, baik berbentuk tes partial maupun tes skala penuh dan tes fungsional.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 129	Penyelenggara pusat data memperhatikan keberlangsungan lingkungan pada saat melakukan perencanaan dan pengoperasian layanan pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 6	Sistem Manajemen Tingkat Layanan (SMTL)			
Indikator 130	Penyelenggara Pusat Data membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 131	Penyelenggara Pusat Data memiliki kendali terhadap informasi terdokumentasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 132	Penyelenggara Pusat Data menyediakan katalog layanan pusat data	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 133	Penyelenggara Pusat Data memiliki perjanjian tingkat layanan yang disetujui antara para pihak yang berwenang	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 134	Penyelenggara Pusat Data menyediakan kontak pelaporan layanan 24 jam	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Aspek 7	Manajemen Keselamatan			
Indikator 135	Penyelenggara Pusat Data menerapkan manajemen keselamatan untuk karyawan, tamu pengguna layanan pusat data, dan pengguna layanan pusat data yang menetap dan berada di lingkungan gedung pusat data pada saat kejadian insiden	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 136	Penyelenggara Pusat Data membuat dan menerapkan Prosedur, Organisasi, dan Evaluasi keselamatan kerja	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 137	Penyelenggara Pusat Data membuat petunjuk jalur evakuasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 138	Penyelenggara Pusat Data melakukan pelatihan keselamatan kerja	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 139	Penyelenggara Pusat Data menyediakan dan menggunakan peralatan keselamatan kerja personal	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 140	Penyelenggara Pusat Data memberitahukan prosedur awal bagi pengunjung pusat data didahului dengan penjelasan singkat jalur evakuasi jika terdengar alarm tanda bahaya	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 141	Penyelenggara Pusat Data menyediakan P3K, nomor kontak keadaan darurat intern dan ekstern, pemadam kebakaran, rumah sakit terdekat dan aparat keamanan terdekat	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 8	Manajemen Proyek			
Indikator 142	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen proyek untuk kegiatan tidak rutin	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 143	Tersedianya fall-back-plan pada proyek yang membutuhkan pemulihan kembali kepada kondisi awal	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 144	Perubahan yang disebabkan proyek yang dilaksanakan, didokumentasikan dan disosialisasikan kepada para pihak terkait, sesuai dengan prosedur manajemen perubahan.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 145	Penggunaan peralatan dan proses penggunaan peralatan, tata cara memasuki gedung pusat data dan area server, instalasi dalam gedung pusat data dan area server, pembongkaran peralatan mengikuti proses akses fisik dan logikal manajemen pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 146	Akhir proyek sekurangnya ditutup dengan surat resmi penutupan akhir proyek	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Tahapan 4	Pemeliharaan			
Aspek 1	Pemeliharaan			
Indikator 147	Bagaimana kompetensi staf dalam pemeliharaan Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait kompetensi staf dalam pemeliharaan Pusat Data Nasional	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen SDM
Indikator 148	Bagaimana daftar dan catatan pemeliharaan peralatan pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait daftar dan catatan pemeliharaan peralatan pada Pusat Data	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 149	Bagaimana pemeliharaan garansi/lifetime peralatan dan perangkat?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait pemeliharaan garansi/lifetime peralatan dan perangkat	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 150	Bagaimana SOP/Prosedur pemeliharaan komponen/suku cadang?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait SOP/Prosedur pemeliharaan komponen/suku cadang	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator 151	Bagaimana laporan perencanaan dan pejadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait SOP laporan perencanaan dan pejadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data Nasional	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Pengetahuan
Aspek 2	Manajemen Konfigurasi Perangkat Keras/MKP (Hardware Configuration Management)			
Indikator 152	Bagaimana prosedur pemeliharaan manajemen konfigurasi perangkat keras?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait prosedur manajemen konfigurasi perangkat keras	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 153	Bagaimana proses pemeliharaan integrasi dari informasi konfigurasi perangkat keras setelah diperbaharui?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait jadwal integrasi informasi konfigurasi perangkat keras	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
Domain 4	Aspek Lain Pusat Data			
Tahapan 1	Kepatuhan			
Aspek 1	Hukum			
Indikator 154	Bagaimana penempatan Pusat Data Nasional di wilayah Indonesia?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait penempatan Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 2	Standard			
Indikator 155	Bagaimana penempatan Pusat Pemulihan Bencana (Business Continuity Plan -BCP)?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait BCP	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
Tahapan 2	Sertifikasi			
Aspek 1	Sertifikasi Pusat Data			
Indikator 156	Bagaimana sertifikasi kelaikan sistem elektronik Pusat Data dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi kelaikan operasi	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Tersedia pertimbangan kelaikan operasi

Indikator 157	Bagaimana sertifikasi kelaikan keamanan Pusat Data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi kelaikan keamanan	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Tersedia pertimbangan kelaikan keamanan
Indikator 158	Bagaimana sertifikasi dari Lembaga nasional/internasional seperti ANSI/TIA-942, uptime institute dan lain-lain?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 159	Bagaimana sertifikasi manajemen mutu seperti ISO 9001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 160	Bagaimana sertifikasi manajemen layanan seperti ISO 20000 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 161	Bagaimana sertifikasi manajemen lingkungan seperti ISO 14001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 162	Bagaimana sertifikasi manajemen kesehatan seperti OHSAS 18001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 163	Bagaimana sertifikasi keamanan informasi seperti ISO 27001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Aspek 2	Sertifikasi Personil			
Indikator 164	Apakah pusat data memiliki SDM tersertifikasi terkait data center seperti Certified Data Centre Expert (CDCE)?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi personil pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Personil Pusat Data

Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Ver. 19022024

Domain 1	Tata Kelola	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
Tahapan 1	Tata Kelola				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Aktivitas 1	Pengaturan TIK	Level 1	Level 2	Level 3	(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
Indikator 1	Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal arsitektur SPBE atau yang membahas penerapan arsitektur layanan instansi (koordinasi)	1. Kebijakan internal arsitektur layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional; 2. Arsitektur layanan SPBE yang memuat obyek audit terkait.	Dokumen Pelaksanaan layanan SPBE terkait obyek audit yang dilakukan sesuai kebijakan (Indikator 11)	Kebijakan instansi yang mengatur arsitektur SPBE instansi terutama dimensi Arsitektur Layanan dimana tertera obyek audit (Indikator 1).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 1 dan 11	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB II Bagian Ketiga tentang Arsitektur SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022.
Indikator 2	Bagaimana instansi mengatur Peta Rencana SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal peta rencana SPBE atau yang membahas penerapan peta rencana instansi (koordinasi)	1. Kebijakan internal peta rencana SPBE yang mengacu pada arsitektur SPBE Nasional; 2. Peta Rencana SPBE yang memuat obyek audit di unsur Aplikasi dan unsur Audit TIK.	Jadwal Peta rencana SPBE yang memperlihatkan jadwal audit TIK sesuai obyek audit.	Kebijakan instansi yang mengatur peta rencana SPBE (Indikator 2).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 2 dan 12	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB II Bagian Keempat tentang Peta Rencana SPBE
Indikator 3	Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan/atau infrastruktur) ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal audit TIK atau yang membahas rencana/tindak lanjut audit (koordinasi).	Kebijakan internal audit TIK instansi.	Hasil audit TIK internal dan/atau eksternal terhadap aplikasi khusus instansi layanan publik dan/atau infrastruktur.	Kebijakan instansi yang mengatur audit TIK (Indikator 9).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 29 dan 30; 2. Permen KOMINFO No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK; 3. Peraturan BRIN tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE (draf).	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB IV tentang Audit TIK
Aktivitas 2		Pengarahan Tata Kelola TIK					
Indikator 4	Bagaimana instansi memberikan tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja (Tim koordinasi SPBE instansi)?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal tim koordinasi SPBE atau membahas koordinasi SPBE antar unit kerja.	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE instansi (Indikator 10).	Terdapat unit kerja yang mengoperasikan obyek audit (Indikator 19).	Kebijakan instansi yang mengatur Tim koordinasi SPBE (Indikator 10).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 10 dan 19.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB V tentang Penyelenggara SPBE
Indikator 5	Bagaimana kolaborasi instansi dengan stakeholder (internal dan eksternal) termasuk kolaborasi aplikasi SPBE?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan kolaborasi antar aplikasi internal dan eksternal atau penerapan kolaborasi (koordinasi).	1. Kebijakan internal arsitektur aplikasi SPBE; 2. Kolaborasi aplikasi SPBE terkait obyek audit baik internal maupun eksternal (terlihat dalam metadata aplikasi pada arsitektur aplikasi).	Terdapat obyek audit dalam arsitektur aplikasi yang menggambarkan kolaborasi aplikasi internal dan eksternal (katalog API).	Kebijakan arsitektur aplikasi yang mengatur kolaborasi aplikasi SPBE (Indikator 20).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 20. 2. Surat Edaran Menteri PANRB No 18 Tahun 2022	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 Pasal 2 ayat 7 dan Pasal 26 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022.
Aktivitas 3		Pengendalian TIK					
Indikator 6	Bagaimana instansi melaksanakan pengendalian SPBE internal?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan pengendalian SPBE internal atau penerapan pengendalian (koordinasi).	Kebijakan Pengendalian internal SPBE sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.	Pelaksanaan pengendalian internal SPBE pada obyek audit dilakukan sesuai kebijakan.	Kebijakan pengendalian internal pemerintahan yang memuat pengendalian internal sistem informasi.	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 (47 Indikator SPBE membutuhkan evaluasi/reviu); 2. Permen KOMINFO No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK; 3. Peraturan BRIN tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE (draf).	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 2. PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan pasal 18 ayat 3c
Domain 2		Manajemen					
Tahapan 1		Perencanaan TIK					
Aktivitas 1		Manajemen Resiko					
Indikator 7	Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan analisis risiko TIK/SPBE (sesuai obyek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada obyek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Formulir Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko Obyek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018

Indikator 8	Bagaimana instansi melakukan evaluasi risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Formulir Evaluasi Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
Indikator 9	Bagaimana instansi melakukan penanganan risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Formulir Penanganan Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
Aktivitas 2 Manajemen SDM							
Indikator 10	Bagaimana instansi melakukan perencanaan SDM SPBE sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan perencanaan SDM pengelola objek audit atau SK TIM pengelola Objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
Indikator 11	Bagaimana instansi melakukan pengembangan kompetensi SDM SPBE sesuai objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sesuai objek audit	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
Indikator 12	Bagaimana instansi melakukan pembinaan SDM pengelola SPBE ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan lengkap pelaksanaan pembinaan SDM SPBE pada objek audit	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
Indikator 13	Bagaimana instansi mendayagunakan SDM SPBE ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Tim pengelola objek audit (aplikasi/infrastruktur)	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
Aktivitas 3 Manajemen Data							
Indikator 14	Bagaimana instansi memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan standar data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Standar Data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 15	Bagaimana instansi melengkapi Metadata dari semua data yang ada di Daftar Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan metadata data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019

Indikator 16	Bagaimana instansi menetapkan data mana saja yang di interoperabilaskan dari Daftar Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan interoperabilitas data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Daftar data dalam objek audit yang diinteroperabilaskan antar instansi atau internal antar unit kerja. atau Metadata data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 17	Bagaimana instansi menerapkan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada data yang dihasilkan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan kode referensi dan data induk pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Kode referensi dan data induk yang diterapkan pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 18	Bagaimana instansi melaksanakan Perencanaan Data yaitu penentuan Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat penyusunan Daftar data/Katalog data/data prioritas pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen penetapan daftar data instansi termasuk data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 19	Bagaimana instansi melaksanakan Pengumpulan Data yaitu terkait dengan data input dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan akses data input pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 20	Bagaimana instansi melaksanakan Pemeriksaan Data yaitu terkait dengan data output dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan data output pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur aplikasi sesuai objek audit atau metadata aplikasi objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 21	Bagaimana instansi melaksanakan Penyebarluasan Data yaitu pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data melalui Portal SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penyebarluasan data atau berbagi data dengan instansi lain pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen data instansi yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI melalui SPLP Kemenkominfo yang menunjukkan data tersebut adalah data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 22	Bagaimana instansi mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi dan ketentuan datanya?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan arsitektur data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Penerapan Arsitektur Data pada data objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019

Indikator 23	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Basis Data terkait data input dan data output serta data bisa dibagikan dari aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan basis data input dan data output pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen arsitektur aplikasi sesuai objek audit serta arsitektur data objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 24	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Kualitas Data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari Data Prioritas?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeriksaan kualitas data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen alur pemeriksaan Kualitas Data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Aktivitas 4	Manajemen Perencanaan Layanan						
Indikator 25	Bagaimana menetapkan atribut metadana layanan yang didukung oleh aplikasi objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan atribut metadana layanan pada objek audit.	1. Pedoman manajemen layanan SPBE instansi 2. Arsitektur Layanan SPBE instansi	Dokumen penetapan Atribut metadana layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 26	Bagaimana melakukan perumusan katalog layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan katalog layanan sesuai objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur katalog layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen Katalog layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 27	Bagaimana menetapkan target layanan pengguna?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target layanan sesuai objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target layanan pengguna /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen penetapan Target layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 28	Bagaimana menetapkan target pengoperasian layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target pengoperasian layanan sesuai objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target pengoperasian layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen Rencana keberlangsungan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Tahapan 2	Pengembangan TIK						
Aktivitas 1	Manajemen Pengetahuan						
Indikator 29	Bagaimana instansi melaksanakan pengumpulan pengetahuan SPBE pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengumpulan pengetahuan pada objek audit.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur pengumpulan Pengetahuan SPBE.	Dokumen yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan Pengetahuan terkait objek audit.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52
Indikator 30	Bagaimana instansi melaksanakan penyimpanan pengetahuan terkait objek audit ke sistem manajemen pengetahuan yang tersedia?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan penyimpanan pengetahuan SPBE pada objek audit.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Penyimpanan Pengetahuan SPBE.	Tempat penyimpanan pengetahuan terkait objek audit.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52

Indikator 31	Bagaimana instansi melaksanakan pengolahan pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengolahan pengetahuan pada objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pengolahan Pengetahuan SPBE	Bukti adanya Pengolahan Pengetahuan terhadap objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52
Indikator 32	Bagaimana instansi melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE untuk meningkatkan mutu pelayanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksanaan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pemanfaatan dan Evaluasi Pengetahuan SPBE	Bukti adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit untuk meningkatkan layanan SPBE.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52
Aktivitas 2		Manajemen Perubahan					
Indikator 33	Bagaimana instansi melakukan perencanaan perubahan yang terjadi pada objek audit ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan perencanaan perubahan.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan SPBE.	Dokumen Perencanaan perubahan pada objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (A)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
Indikator 34	Bagaimana Instansi melakukan analisis perubahan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan analisis perubahan objek audit..	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur analisis perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan analisis perubahan pada objek audit	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (B)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
Indikator 35	Bagaimana instansi melakukan pengembangan perubahan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengembangan perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengembangan perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan pengembangan perubahan objek audit sesuai pedoman manajemen perubahan.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (C)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
Indikator 36	Bagaimana instansi melakukan implementasi perubahan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan implementasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur implementasi perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan implementasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (D)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
Indikator 37	Bagaimana instansi mengevaluasi dan memantau perubahan yang telah dilakukan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat evaluasi dan pemantauan perubahan pada objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur evaluasi dan pemantauan perubahan SPBE	Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (E)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
Aktivitas 3		Manajemen Aset					

Indikator 38	Bagaimana instansi melakukan perencanaan kebutuhan aset TIK?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat perencanaan kebutuhan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen perencanaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.
Indikator 39	Bagaimana instansi melakukan pengadaan aset TIK (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengadaan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengadaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen pengadaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.
Indikator 40	Bagaimana instansi melakukan pengelolaan aset TIK yang dimiliki ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengelolaan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengelolaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen pengelolaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.
Indikator 41	Bagaimana cara instansi melakukan penghapusan aset TIK yang dimiliki?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat penghapusan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur penghapusan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen penghapusan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.
Tahapan 3	Pengoperasian TIK						
Aktivitas 1	Manajemen Operasional Layanan						
Indikator 42	Bagaimana memberikan bantuan terhadap permintaan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemberian bantuan terhadap permintaan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemberian bantuan terhadap permintaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Formulir permintaan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 43	Bagaimana melakukan penanganan gangguan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan penanganan gangguan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur penanganan gangguan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Formulir penanganan gangguan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 44	Bagaimana melakukan pemantauan dan pemeliharaan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemantauan dan pemeliharaan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemantauan dan pemeliharaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Laporan Ketersediaan Layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 45	Bagaimana melakukan pemulihan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemulihan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemulihan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Laporan Evaluasi DRP objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018

Indikator 46	Bagaimana melakukan rilis layanan secara terkendali untuk meminimalkan terjadinya dampak operasional?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan rilis layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur rilis layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen rencana rilis objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 47	Bagaimana melakukan evaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan evaluasi pelaksanaan operasional layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur evaluasi pelaksanaan operasional layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Laporan evaluasi (keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan) objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja						
Tahapan 1	Perencanaan						
Aktivitas 1	Persyaratan Layanan (Business Requirement)						
Indikator 48	Bagaimana atribut metadata proses bisnis instansi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata proses bisnis objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Arsitektur proses bisnis instansi yang menggambarkan layanan objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
Indikator 49	Bagaimana proses pengusulan layanan/fungsi pada awal perencanaan aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pengusulan proposal objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pengusulan aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen perencanaan aplikasi yang berisi layanan sesuai proses bisnis objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
Indikator 50	Jelaskan secara rinci kebutuhan dan pemetaan hak akses pengguna beserta perannya (user role management)!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hak akses pengguna objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pengguna aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen yang berisi pemetaan hak akses pengguna objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
Indikator 51	Jelaskan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsional dan non-fungsional objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsional dan non-fungsional aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen penjelasan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
Indikator 52	Bagaimana arsitektur aplikasi mendeskripsikan keterkaitan antara proses bisnis, data, dan informasi sebagai layanan yang terintegrasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan keterpaduan layanan objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan serta data yang dibutuhkan dan dihasilkan. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Gambaran dan penjelasan relasional arsitektur objek audit sebagai layanan yang terintegrasi antara proses bisnis, layanan, data dan informasi.	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61

Indikator 53	Apakah lisensi yang digunakan pada Aplikasi tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan lisensi pada objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Perjanjian tingkat layanan / Service Level Agreement objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
Aktivitas 2							
Kebutuhan Aplikasi (Software Requirement)							
Indikator 54	Apa saja proses / fungsi / layanan yang dapat dilakukan oleh aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen proposal perencanaan aplikasi yang menjelaskan fungsi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 55	Bagaimana penggambaran interaksi antar komponen yang ada pada aplikasi dengan antarmuka (interface), dan apakah navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan antar muka internal dan eksternal objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan antar muka internal dan eksternal objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 56	Jelaskan kemampuan kerja yang dapat dicapai oleh aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kemampuan kerja objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kemampuan kerja aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait kemampuan kerja objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 57	Bagaimana penggambaran/penjelasan atribut metadata yang terkait pada aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata aplikasi objek audit	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur Imetadata aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait atribut metadata aplikasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 58	Apakah terdapat batasan khusus yang harus ada di dalam rancangan perangkat lunak?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait batasan desain objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Aktivitas 3							
Rancangan Aplikasi (Software Design)							
Indikator 59	Apakah aplikasi dirancang dengan memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data di masa depan?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait skalabilitas dan kinerja objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36

Indikator 60	Apakah memiliki dokumen mengenai deskripsi rancangan detil teknis basisdata dari aplikasi (detail of database engineering design)?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen deskripsi rancangan detil teknis basisdata objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 61	Bagaimana pemetaan dan keterhubungan antar fungsi dan basis data dalam aplikasi beserta kepemilikan basisdata input dan outputnya?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen deskripsi rancangan detil teknis basisdata aplikasi yang menggambarkan kepemilikan basis data input dan output objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 62	Bagaimana bentuk arsitektur aplikasi sehingga dapat menggambarkan keseluruhan sistem, proses bisnis, dan layanan aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen yang menggambarkan relasi proses bisnis dan layanan objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 63	Apakah aplikasi dirancang dengan menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen deskripsi rancangan aplikasi tingkat rendah pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 64	Jelaskan arsitektur/rancangan aplikasi yang bersifat service-oriented architecture dan/atau microservices yang diintegrasikan dengan aplikasi lainnya?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan <i>microservices</i> aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait arsitektur layanan <i>microservices</i> pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Tahapan 2	Pengembangan						
Aktivitas 1	Implementasi Aplikasi (<i>Software Implementation</i>)						
Indikator 65	Jelaskan metode-metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metode pengembangan objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur metode pengembangan aplikasi	Dokumen penjelasan metode pengembangan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 12	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 36.
Indikator 66	apakah sudah memiliki dokumentasi aplikasi yang memuat penjelasan dari setiap fungsi kode sumber, Metadata, kamus data, format data, dan lain sebagainya?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi setiap kode sumber serta format data objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsi kode sumber, format data.	Dokumentasi objek audit yang memuat penjelasan setiap fungsi kode sumber, kamus data dan format data objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 5 dan 6	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 36.

Indikator 67	Bagaimana aplikasi dapat digunakan kembali secara berkesinambungan di masa yang akan datang?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar komponen objek audit yang dapat digunakan kembali di masa yang akan datang	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur repositori aplikasi	Dokumen Daftar komponen aplikasi objek audit yang dapat dimanfaatkan kembali di masa yang akan datang	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 2	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 68	apakah kode sumber aplikasi dapat dimodifikasi / open source dan memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan bagian objek audit yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya.	Dokumentasi kode sumber yang mampu diintegrasikan pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 6	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 35.
Indikator 69	Apakah kode aplikasi bersifat modular dan memenuhi syarat fungsional dan non-fungsional?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar katalog atau library objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE aplikasi yang modular	Dokumen penjelasan daftar katalog atau library kode sumber objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 70	Bagaimana sistem pencatatan aktifitas rekam jejak (log file) yang ada pada aplikasi untuk kepentingan pemantauan, evaluasi, audit, dan investigasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan log file objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur rekam jejak (log file)	Dokumen penjelasan pencatatan log file objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 6	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 71	Bagaimana instansi menyimpan kode sumber dan dokumentasi aplikasi? Apakah disimpan oleh instansi secara langsung atau dititipkan kepada pihak ketiga yang terpercaya?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan tempat penyimpanan kode sumber objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur tempat penyimpanan kode sumber	Dokumen penjelasan tempat penyimpanan kode sumber dan dokumentasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 37	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 37.
Aktivitas 2 Pengujian (Testing)							
Indikator 72	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji fungsi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji fungsi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi	Gambaran dan penjelasan rencana pengujian	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 73	Jelaskan hasil uji fungsi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji fungsi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi	Dokumen hasil uji fungsi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 74	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji beban aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji beban aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi	Dokumen perencanaan dan metodologi uji fungsi beban audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 75	Jelaskan hasil uji beban aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji beban aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi	Dokumentasi hasil uji beban objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 76	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji integrasi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji integrasi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi	Dokumen perencanaan dan metodologi uji integrasi audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 77	Jelaskan hasil uji integrasi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji integrasi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi	Dokumentasi hasil uji integrasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Aktivitas 3							
Instalasi/Pemasangan (<i>Installation</i>)							
Indikator 78	Jelaskan prosedur instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan prosedur pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur prosedur instalasi aplikasi	Gambaran dan penjelasan prosedur instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 79	Apakah sudah memiliki daftar personil yang bertugas untuk melakukan instalasi/pemasangan aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar personil yang melakukan pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur daftar personil yang bertugas instalasi aplikasi	Daftar SDM, kompetensi dan tugas personil dalam melakukan instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 80	jelaskan rencana pelatihan terhadap personil yang melakukan instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana pelatihan personil yang melakukan pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelatihan personil yang melakukan instalasi aplikasi	Dokumen yang menjelaskan rencana pelatihan pemasangan aplikasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 81	Jelaskan jadwal instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan jadwal pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur jadwal instalasi aplikasi	Dokumen yang menjelaskan jadwal instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 82	Jelaskan daftar fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi (pemasangan) aplikasi dilakukan!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar fasilitas pemasangan aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi aplikasi	Dokumen yang menjelaskan daftar fasilitas instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahapan 3	Pengoperasian						
Aktivitas 1	Penggunaan Aplikasi (<i>Software Usage</i>)						

Indikator 83	Bagaimana aplikasi berkolaborasi dengan aplikasi lain?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan API/kolaborasi aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kolaborasi antar aplikasi	1. Dokumentasi API objek audit 2. Daftar layanan yang terhubung ke objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 84	Apakah memiliki manual aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan manual aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur manual aplikasi	1. manual penggunaan aplikasi bagi administrator objek audit; 2. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna objek audit;	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 19	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 85	Bagaimana aplikasi menyediakan fasilitas helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fasilitas helpdesk (layanan bantuan) aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan bantuan bisnis kepada pengguna aplikasi dan teknis aplikasi	Dokumen log/proses layanan bantuan (help desk) proses bisnis dan teknis operasional objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 86	Bagaimana menyusun Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequently Asked Questions) untuk pengguna aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan FAQ aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur FAQ proses bisnis kepada pengguna dan teknis aplikasi	Dokumen Daftar FAQ proses bisnis dan teknis operasional objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Aktivitas 2 Infrastruktur Pendukung Aplikasi							
Indikator 87	Bagaimana infrastruktur yang dimiliki memenuhi kesesuaian dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan.	- Kebijakan Internal Layanan SPLP terkait pengoperasian - Kebijakan Internal Layanan JIP terkait pengoperasian	Dokumen perencanaan infrastruktur sesuai kebutuhan kapasitas aplikasi dan tingkat layanan. objek audit	1. Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Indikator 5); 2. Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6); 3. Kebijakan Internal Layanan SPLP (Indikator 7).	1. SNI 8799 2019 Bagian 1 dan 2; 2. Permen KOMINFO No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data. Pasal 5; 3. RPM KOMINFO Tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintah. Pasal 3.	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 28.
Indikator 88	Bagaimana aplikasi memanfaatkan teknologi cloud pada pusat Data Nasional atau pada pihak ketiga, untuk penempatan dan penyimpanan data?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan PDN untuk aplikasi	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan dokumen layanan pusat data instansi	Bukti keterhubungan objek audit dengan Pusat Data Nasional	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Indikator 5) dan layanan Pusat Data indikator 16.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 23	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 30 Ayat 3.
Indikator 89	Bagaimana aplikasi yang dimiliki terhubung dengan Layanan Interoperabilitas Data (LID) IPPD dan/atau LID Nasional?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Layanan interoperabilitas yang terhubung ke aplikasi.	Kebijakan Internal Layanan SPLP dan dokumen layanan SPLP instansi	Bukti keterhubungan objek audit dengan SPLP Nasional	Kebijakan Internal Layanan SPLP (Indikator 7 dan layanan SPLP indikator 18.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 7 Ayat 9	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 33 Ayat 2.
Indikator 90	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Sistem Penghubung Layanan dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur	Atribut metadata Sistem Penghubung Layanan objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE internal yang mengatur tentang Metadata Sistem Penghubung Layanan (Indikator 7) dan layanan SPLP indikator 18	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Perpres Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE.

Indikator 91	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur	Atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE yang mengatur tentang Metadata Komputasi Awan/Fasilitas Komputasi (Indikator 1) dan layanan pusat data indikator 16	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Perpres Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE.
Aktivitas 3		Utilitas/Kinerja Jaringan					
Indikator 92	Bagaimana prosedur pengoperasian jaringan intra yang digunakan aplikasi menghubungkan antar simpul jaringan secara berjenjang?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang di audit atau simpul jaringan.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	- Prosedur pengoperasian JIP; - Konfigurasi jaringan.	Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6) dan indikator 17 tentang layanan JIP	RPM KOMINFO Tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintah. Hal 6 BAB JARINGAN BADAN PEMERINTAHAN Ayat 1, 2 dan 3.	Perpres SPBE Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB IV Huruf C. Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor 2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah.
Indikator 93	Bagaimana prosedur dan dokumentasi jika terjadi gangguan dan penanganannya dalam rangka pengoperasian jaringan?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang di audit atau penanganan gangguan dalam rangka pengoperasian jaringan.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen Prosedur penanganan gangguan jaringan; dan Rekam jejak penanganan gangguan jaringan yang digunakan objek audit	Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6) dan indikator 17 tentang layanan JIP	RPM KOMINFO Tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintah. Pasal 1 Ayat 13	Perpres SPBE Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB IV Huruf C. Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor 2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah.
Indikator 94	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE yang mengatur tentang Metadata Jaringan Intra Pemerintah (Indikator 1) dan Arsitektur infrastruktur (indikator 11)	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Perpres Nomormor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE.
Tahapan 4		Pemeliharaan					
Aktivitas 1		Pemeliharaan Aplikasi					
Indikator 95	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan perfektif, pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan perfektif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan perfektif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 96	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan adaptif, yang merupakan pemeliharaan adaptasi aplikasi terhadap teknologi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan adaptif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan adaptif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 97	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan korektif, yang merupakan perbaikan aplikasi terhadap permasalahan yang timbul setelah aplikasi digunakan ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan korektif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan korektif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa perbaikan terhadap permasalahan yang timbul setelah objek audit digunakan.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 98	Bagaimana pemeliharaan preventif, yang merupakan pemeriksaan aplikasi secara berkala untuk mengantisipasi permasalahan ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan preventif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022

Indikator 99	Unit kerja mana yang harus melaksanakan pemeliharaan aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan aplikasi antar unit kerja.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur unit kerja pelaksana pemeliharaan aplikasi.	Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan pemeliharaan objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Aktivitas 2		Pemeliharaan Infrastruktur pendukung					
Indikator 100	Bagaimana menyimpan back up aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur backup aplikasi	Dokumen Penyimpanan Backup aplikasi	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 101	Bagaimana melaksanakan pendaftaran Aplikasi SPBE	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pendaftaran aplikasi	Dokumen bukti pendaftaran aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 33	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 102	Bagaimana pemeliharaan kode sumber pada repositori aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur repositori aplikasi	Dokumen bukti pemeliharaan kode sumber / repositori penyimpanan kode sumber	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 6, ayat 2	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Aktivitas 3		Evaluasi dan Pemantauan Aplikasi					
Indikator 103	Unit kerja mana yang harus melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksana evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pelaksana evaluasi aplikasi	Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 15	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 104	Bagaimana menetapkan indikator keberhasilan aplikasi sebagai alat ukur evaluasi aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan penetapan indikator keberhasilan evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur alat ukur evaluasi aplikasi	Alat ukur evaluasi keberhasilan objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 15	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 105	Bagaimana menindaklanjuti hasil evaluasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur tindak lanjut hasil evaluasi.	Dokumen hasil tindak lanjut evaluasi	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 15	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022

Prosedur untuk mendapatkan Akun Audit Internal SPBE

1. Mengirimkan Surat Keputusan (SK) Tim Audit Internal SPBE yang ditetapkan oleh Koordinator SPBE Instansi yang memuat cakupan berikut
 - a. Obyek Audit yang akan dilakukan audit internal
 - b. Nama, NIP, OPD atau Unit Kerja dari Auditor untuk obyek audit terkait
 - c. Nama, NIP, OPD atau Unit Kerja dari Auditee untuk obyek audit terkait
2. Permohonan dikirimkan ke layanan.auditspbe@brin.go.id
3. Pemohon akan mendapatkan akun login ke <https://audit-tools-spbe.brin.go.id/webaudit> yang dikirimkan melalui alamat email pemohon

Catatan: Mengingat Penilaian Audit Internal dikaitkan dengan Kebijakan Audit SPBE Instansi dan Peta Rencana Audit Instansi, sebaiknya juga dikirimkan Kebijakan dan Peta Rencana Audit tersebut di atas.

Contoh Tabel lampiran SK Tim Audit adalah sebagai berikut:

Aplikasi / Infrastruktur	Obyek Audit	Auditor Internal			Auditee Internal		
		Nama	NIP	Unit Kerja	Nama	NIP	Unit Kerja
Aplikasi	Aplikasi A						
		1.			1.		
		2.			2.		
		3.			3.		
		...			4.		
					...		
	Aplikasi B						
		1.			1.		
		2.			2.		
		3.			3.		
		...			4.		
					...		
	...						
Infrastruktur	Jaringan Intra Pemerintah (JIP)						
		1.			1.		
		2.			2.		
		3.			3.		
		...			4.		
					...		
	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)						
		1.			1.		
		2.			2.		
		3.			3.		
		...			4.		
					...		

Auditor Internal adalah pegawai instansi yang mempunyai kompetensi TIK (tidak harus mempunyai sertifikat) dan dapat berasal dari unit kerja manapun.